BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan gerakan sosial yang ada di dunia tidak lepas dari berbagai deretan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Gerakan sosial sendiri muncul sekitar abad ke-17 pasca terjadinya revolusi industri di Eropa. Revolusi industri di Eropa menyebabkan muncul paham baru yakni paham Kapitalisme, dimana paham ini menempatkan faktor kapital atau modal sebagai fokus utamanya. Adam Smith sebagai toggak Kapitalisme klasik dengan gagasan *"laissez faire"* dalam bentuk ekonomi.[1] Kapitalisme menjadi faktor utama dari adanya struktur perekonomian pasar bebas yang ada di Negara-negara yang ada di dunia dengan tatanan masyarakat Neo-liberalisme. Respon dari masuknya Neo-liberalisme dan juga Kapitalisme ini yakni dengan munculnya berbagai gerakan sosial yang menentang adanya Kapitalisme dan Neo-liberalisme.

Respon dari munculnya paham Kapitalisme yang menyebabkan munculnya jurang pemisah antara para kaum pemilik modal dengan para kaum buruh membuat Karl Marx melakukan kritik dengan bentuk paham Marxis. Menurut Karl Marx munculnya industrialisasi yang kemudian para pemilik modal memperlakukan para kaum buruh dengan semenah-menah. Hal inilah yang

[1]Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat para kaum buruh melakukan sebuah gerakan dengan tujuan ingin melalukan penghapusan kepemilikan hak atas pribadi.[2]

Gerakan sosial muncul sebagai bentuk respon terhadap munculnya Neo-liberal. Di Indonesia sendiri gerakan sosial dapat dikatakan sudah muncul pada saat penjajahan Belanda di Indonesia. Gerakan sosial di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori yakni sebelum tahun 1966 dan setelah tahun 1966.[3] Pembagian dua periode tersebut dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1966 gerakan sosial yang ada di Indonesia lebih kepada mobilisasi pemberian dukungan terhadap legitimasi negara Indobesia yang pada saat itu baru merdeka. Sedangkan setelah tahun 1966, gerakan sosial yang muncul lebih mengarah pada kritik atau reaksi terhadap kebijakan negara. Berdasarkan akar historisnya gerakan sosial di Indonesia dapat dikatakan memiliki akar sejarah yang kuat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai gerakan sosial yang dimulai setiap perlawanan rakyat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Gerakan sosial yang muncul pada masa itu lebih banyak kepada gerakan petani, gerakan buruh, gerakan pemuda, dan gerakan mahasiswa yang telah menghiasi catatan sejarah gerakan sosial di Indonesia.

Memasuki rezim pemerintahan Soekarno, gerakan sosial di Indonesia masih diwarnai oleh perlawanan dari gerakan pelajar dan gerakan mahasiswa. Gerakan kaum intelektual yang hadir dan muncul setidaknya ikut andil dalam proses demokrasi sehingga hal ini memunculkan adanya rezim otoriter pada masa

---

[2]Ibid., 43.
[3]Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan Soekarno. Pada tahun 1966 gerakan kaum intelektual atau mobilisasi gerakan mahasiswa berhasil melengserkan rezim Orde Lama yang kemudian hal ini menghadirkan rezim orde baru yang lebih otoriter dan militeristik. Namun pada akhirnya gerakan mahasiswa yang memprakarsai berdirinya rezim orde baru justru menjadi alat baru untuk menumbangkan rezim Soeharto. Maka dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa gerakan sosial di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda datang dan menjajah di Indonesia hingga adanya rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia.

Gerakan yang muncul di Indonesia bukan hanya gerakan dalam bidang mahasiswa, kaum intelektual, dan juga para petani melainkan gerakan lain yang mempengaruhi kondisi masyarakat dan struktur di Indonesia salah satunya adalah gerakan buruh. Dalam sejarah gerakan buruh di Indonesia diawali ketika diterapkannya sistem Tanam Paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membuat para petani di nusantara utamanya di daerah Jawa yang pada saat itu sebagai pusat kekuasaan Hindia Belanda mulai dihancurkan kehidupannya sebagai petani dan diubah secara paksa menjadi Buruh Tani.

Berdasarkan sejarah yang ada, latar belakang historis munculnya gerakan buruh di Indonesia diawali ketika diterapkannya sistem Tanam Paksa (*culture stelsel*) oleh pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu. Mulai dari sistem inilah yang membuat petani di Nusantara dirubah secara paksa menjadi buruh tani. Masuknya para penjajah di Nusantara diikuti dengan masuknya pengaruh Liberalisme dan juga ekonomi Kapitalis yang menyebabkan semakin tumbuh suburnya perkebunan swasta yang menggantikan perkebunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik pemerintah Belanda. Banyaknya perkebunan juga membutuhkan banyak buruh atau tenaga kerja, sehingga pada saat itu banyak tenaga kerja dari Jawa yang dikirim ke perkebunan di Sumatera untuk dipekerjakan dengan sistem kontrak dan ancaman yang kejam. Sehingga hal inilah yang memicu munculnya bentuk perlawanan yang khas sebah gerakan buruh yakni pemogokan. Salah satu pemogokan pertama di Indonesia yakni tercatatn pada tahun 1882 di Yogyakarta, dimana pada puncaknya terjadi aksi pemogokan di 21 pabrik gula yang ada di daerah tersebut.[4]

Pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno terdapat banyak serikat buruh yang muncul dan didirikan guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para buruh meskipun didalamnya terdapat banyak kepentingan dari partai-partai politik pada masa itu. Kemunduran dari para serikat buruh yang eksis pada masa pemerintahan Soekarno dimulai pada kudeta yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan pelengseran dari Presiden Soekarno. Hal inilah yang membuat banyaknya pemimpin-pemimpin serikat buruh ditangkap dan dibunuh pada masa pemerintahan rezim yang baru yakni rezim Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru terjadi pembungkaman dari gerakan buruh kebebasan berserikat dibatasi dan apabila menginginkan berserikat maka harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh rezim orde baru. Terbukti dengan adanya rekonstruksi serikat buruh yang dilaksanakan dalam bentuk FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 20 Februari tahun 1973 dengan Agus Sudono sebagai ketua umum

[4]Ibid., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama dan sekjennya adalah Suwarto seorang mantan perwira operasi khusus pendahulu kopkamtib. Maka dapat diketahui bahwa jajaran pengurus SPSI selalu diambil dari kader-kader Partai Golkar, sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh dari ABRI atau tentara, birokrasi dan juga Golkar pada masa pemerintahan Soeharto sangatlah terlihat.

Pada awal berdirinya FBSI memiliki anggota 21 serikat buruh, 21 serikat buruh yang terintegrasi dan terorganisir ke dalam 21 Serikat Buruh Lapang Pekerjaan (SBLP) yang sifatnya sektoral.[5] Berdirinya SBSI ini ditujukan untuk memberantas para serikat buruh dan menutup dunia politik bagi para buruh. Pada akhirnya FBSI tidak dapat menghentikan perselisihan antar buruh dan juga pengusaha. Adanya devaluasi yang terjadi pada tahun 1978 yang membuat harga-harga kebutuhan pokok menjadi melambung tinggi tetapi upah buruh masih tetap, maka inilah yang membuat para buruh melakukan perlawanan pada masa pemerintahan rezim orde baru. Karena insiden ini, pada tahun 1985 SBSI diganti menjadi SPSI.[6] SPSI sendiri dirancang rezim orde baru untuk memberantas aspirasi politik buruh tetapi tetap saja pada akhirnya SPSI justru digunakan oleh banyak buruh untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Seperti yang terjadi pada Marsinah yang merupakan buruh di salah satu pabrik di Sidoarjo yang gugur karena memperjuangkan pembentukan SPSI di pabriknya.

Perubahan yang dilakukan dari FSBI menjadi SPSI membuat 21 serikat pekerja hanya menjadi 9 departemen. Hal ini menjadi sebuat perdebatan antara

---

[5]KSPSI, "Tentang KSPSI", http://kspsi.com/tentang-kspsi-3/ (Selasa, 17 Januari 2017, 19.57)
[6]Ibid., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi pekerja Internasional, sehingga pada tahun 1994 SPSI berubah menjadi FSPSI. Pasca Orde Baru, kebebasan dalam berserikat khususnya bagi para pekerja/buruh yang telah ditetapkan pada UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 ini secara tidak langsung memberikan kebebasan bagi para buruh untuk mendirikan serikat atau organisasi-organisasi pekerja/buruh. Ketetapan ini dikeluarkan pasca Orde Baru dimana pada masa tersebut kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran sangatlah dibatasi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ini membukan kesempatan bagi para pekerja/buruh untuk bisa berserikat dan berkumpul.

Pada tahun 2014 sesuai pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tercatat ada 6 konfederasi, 100 federasi, dan 6.808 serikat pekerja tingkat perusahaan yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar terdapat sekitar 1.678.364 orang pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja.[7]

Apabila berbicara tentang pekerja maka tidak akan lepas dari upah atau pengupahan. Kebijakan pengubahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi para pekerja atau buruh.[8] Di Indonesia proses pengupahan atau kenaikan dari upah itu sendiri sering menjadi hal yang memunculkan konflik antara pekerja dengan pemerintah. Bukan hanya

[7]Hukum Online, "Inilah Data Serikat Pekerja di Indonesia", http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b8691e26785/inilah-data-serikat-pekerja-di-indonesia (Selasa, 1 November 2016, 18.40)
[8]PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konflik tetapi aksi demo buruh menuntuk kenaikan upah setiap tahunnya juga tidak bisa dilupakan.

UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, juga termasuk tunjangan tetap yang telah diatur dalam Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-231/MEN/2003 dengan merujuk Kebutuhan Hidup Layak (KHL).[9]

Sistem kenaikan upah di Indonesia berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada. Hal ini mengakibatkan banyak kelompok pekerja yang melakukan aksi baik itu aksi secara diplomatis atau aksi demonstrasi untuk menuntuk kenaikan upah dari para buruh. Salah satu dari kelompok pekerja yang terdaftar dalam Kementerian Ketenagakerjaan adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang merupakan salah satu kumpulan yang anggotanya terdiri dari para pekerja/buruh. KSPSI sebagai salah satu bentuk dari kelompok kepentingan tentunya menghimpun berbagai macam aspirasi dari para pekerja yang termasuk dalam anggota perserikatan ataupun pekerja yang tidak tergabung didalamnya. KSPSI menyampaikan aspirasi tersebut untuk dibawa ke pemerintah agar aspirasi atau keluhan dari para buruh dapat dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan khususnya kebijakan kenaikan gaji atau upah para pekerja.

[9]Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung: Gaji Pokok Pajak Atas Gaji Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek, Dana Sehat* (Jakarta: Forum Sehat, 2008), 3 — 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenaikan upah pekerja menurut Menteri Ketenagakerjaan yang harus berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 ini secara terang-terangan ditolak oleh para pekerja, karena kenaikannya tidak sesuai dengan kenaikan dari kebutuhan hidup yang semakin meningkat pula. Sehingga hal inilah yang mendorong DPC KSPSI Kota Surabaya melakukan berbagai upaya untuk melakukan perjuangan penuntutan kenaikan upah di Kota Surabaya tahun 2015.

Alasan peneliti memilih organisasi buruh/pekerja KSPSI adalah karena KSPSI lebih menggunakan langkah-langkah persuasif, aksi-aksi yang dilakukan dikemas dengan lebih halus dan tidak anarkis seperti melakukan aksi yang bersifat intelektual dengan cara berdiskusi dan seminar, sehingga harapan dari para pekerja dapat tersampaikan dengan baik.

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas menarik jika dianalisis lebih jauh terkait dengan pola gerak yang dilakukan oleh KSPSI Cabang Kota Surabaya dalam menyikapi isu tuntutan kenaikan upah di Kota Surabaya 2017. Maka dari itu, judul dari penelitian ini adalah "Pola Gerakan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya Dalam Proses *Bargaining* Tuntutan Kenaikan UMK Tahun 2017 di Kota Surabaya".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana pola gerakan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya dalam proses *bargaining* tuntutan kenaikan UMK tahun 2017 Kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisa pola gerakan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya dalam proses *bargaining* tuntutan kenaikan UMK Tahun 2017 Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti akan memaparkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang khusus dalam bidang politik dan wawasan pengetahuan yang lebih luas tentang pola gerakan KSPSI sebagai serikat pekerja/buruh dalam proses *bargainingi* tuntutan kenaikan UMK.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi landasan berpikir dalam melihat bagaimana pola gerakan KSPSI Cabang Kota Surabaya dalam proses *bargaining* dengan Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, bagi pengamat politik atau ahli politik, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan analisa dan wacana kedepan mengenai pola gerakan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya dalam proses *bargaining* tuntutan kenaikan UMK tahun 2017 di Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran, penelitian lain yang relevan dengan penelitian Pola Gerakan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya Dalam Proses *Bargaining* Tuntutan Kenaikan UMK Tahun 2017 di Kota Surabaya yakni penelitian yang dilakukan oleh Ganda Syahputra, S (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Medan) dalam skripsi dengan judul "Peranan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik (Studi Kasus: Serikat Buruh Medan Independen)". Hasil dari penelitian ini menunjukkan SBMI (Serikat Buruh Medan Independen) belum berhasil dalam memasukkan agenda dalam proses pengambilan kebijakan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam hal penetapan upah bagi buruh di Provinsi Medan.[10] Sedangkan penelitian ini berfokus pada perjuangan Serikat Buruh Medan Independen (SBMI) dalam kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Medan. Penelitian ini menunjukkan peran serikat buruh khususnya Serikat Buruh Medan Indonesia (SBMI) dalam kenaikan Upah Minimum Kota di Medan.

Penelitian kedua yang relevan yakni penelitian yang dilakukan oleh Umar Algifari dalam skripsinya dengan judul "Buruh dan Politik: Studi Tentang Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (K.KASBI) Dalam Menuntut Penghapusan Sistem *Outsourcing* dan kenaikan UMP DKI Jakarta

[10]Ganda Syahputra, "Peranan Serikat Buruh Dalam Memperjuangkan Hak Upah dan Politik (Studi Kasus: Serikat Buruh Medan Independen)" (Sripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2013".[11] Hasil penelitian ini menunjukkan KSPSI dan K.KASBI merupakan organisasi pekerja/buruh yang sama-sama memperjuangkan kepentingan dari pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh dapat hidup sejahtera. Perjuangan yang dilakukan oleh KSPSI dan K.KASBI dalam penghapusan sistem *outsourcing* dan kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2013 berbeda. Fokus dari penelitian ini yakni pada perjuangan organisasi pekerja/buruh KSPSI dan K.KASBI yang menuntut penghapusan sistem *outsourcing* yang dianggap pekerja/buruh adalah sistem perbudakan di Indonesia dan menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta tahun 2013. Fokus utama dari penelitian ini adalah tentang perbedaan perjuangan yang dilakukan oleh KSPSI dan K.KASBI yang merupakan sama-sama organisasi serikat buruh/pekerja.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ganda Syahputra dan Umar Algifari dengan peneliti adalah serikat/organisasi buruh/pekerja yang berbeda, tempat penelitian yang berbeda, dan pemilihan kasus yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ganda Syahputra yakni tentang organisasi serikat pekerja/buruh SBMI dalam tuntutan kenaikan UMP di Medan. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Umar Algifari berfokus pada perbedaan perjuangan dua serikat buruh yakni KSPSI dan K.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem *outsourcing* dan kenaikan UMP DKI Jakarta pada tahun 2013. Sedangkan peneliti akan fokus pada pola gerakan KSPSI cabang Kota Surabaya dalam proses

[11]Umar Algifari, "Buruh dan Politik: Studi Tentang Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesua (KSPI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (K.KASBI) Dalam Menuntut Penghapusan Sistem Outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2013" (Skripsi, Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bargaining tuntutan kenaikan UMK tahun 2017 di Kota Surabaya yang sebelumnya belum terdapat penelitian dengan fokus kajian, tempat, dan waktu penelitian yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang sesuai akan mempermudah untuk menganalisa dan menyikapi masalah yang diteliti.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu metode baru, dimana penelitian yang dilakukan berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Metode penelitian ini juga disebut sebagai proses penelitian artistik karena proses penelitian bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.[12]

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) cabang Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

3. Informan Penelitian

   Teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada prosedur penentuan informan purposif sampling, dimana teknik penentuan informan

[12]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan salah satu strategi menentukan informan dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang dipilih yang relevan dengan masalah yang diteliti.[13] Ukuran dari sampel purposif sering kali ditentukan atas dasar teori kejenuhan (titik dalam pengumpulan data saat data baru tidak lagi membawa wawasan tambahan untuk pertanyaan penelitian). Tetapi informan selanjutnya akan ditentukan bersamaan dengan perkembangan *review* dan analisis hasil penelitian saat pengumpulan data sedang berlangsung.[14]

Berikut adalah informan dalam penelitian ini, yakni:

a. Ketua KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya.
b. Anggota KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya.
c. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya.
d. Anggota APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Surabaya.

4. Sumber Data

a. Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber primer ini diperoleh secara langsung dari

[13]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kenaca Prenada Media Group, 2007), 107.
[14]Ibid., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informan dengan melalui teknik pengumpulan data wawancara dan juga hasil observasi secara langsung terhadap informan.

Informan yang menjadi sumber utam adalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Ketua KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya.
2) Anggota KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya.
3) Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya.
4) Anggota APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Surabaya.

b. Sekunder

Sumber data yang kedua yakni sumber sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain selain data primer. Sumber tersebut terdiri dari arsip, dokumen, dan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data memegang peran penting didalamnya, sehingga benar dan tidaknya data tersebut akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Benar dan tidaknya suatu data juga tergantung dari teknik pengumpulan datanya. Maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik observasi dalam pengumpulan data merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi.[15] Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, peneliti dapat mengamati fenomena atau kegiatan yang relevan dengan yang akan diteliti yakni Pola Gerakan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya Dalam Proses *Bargaining* Tuntutan Kenaikan UMK Tahun 2017 di Kota Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara selaku yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara selaku pihak yang menjawab pertanyaan.[16] Dalam penelitian yang dilakukan, maka peneliti secara langsung melakukan proses wawancara dengan informan yang telah ditentukan terkait dengan Pola Gerakan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Cabang Kota Surabaya Dalam Proses *Bargaining* Tuntutan Kenaikan UMK Tahun 2017 di Kota Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dalam hal ini dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), 226.
[16]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Roesda Karya, 1996), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

monumental dari seseorang.[17] Dalam penelitian yang dilakukan maka peneliti menggunakan gambar yang dalam hal ini adalah foto dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[18]

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Dimana teknik ini menjelaskan data yang sudah diperoleh secara menyeluruh. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.[19]

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik keabsahan data perpanjangan keikutsertaan; jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif instrumen penelitian salah satunya yakni peneliti itu sendiri. Maka dalam penelitian ini peneliti wajib ikut serta guna untuk memperoleh data yang

[17]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), 240.
[18]Ibid., 244.
[19]Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

valid. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kevalidan data yang telah dikumpulkan.

b. Teknik keabsahan data ketekunan pengamatan; peneliti disini secara tekun mencari dan mengumpulkan data yang valid yang sesuai dengan permasalahan, kemudian peneliti memusatkan diri pada data yang telah diperoleh secara rinci.

c. Teknik keabsahan data pemeriksaan sejawat melalui diskusi; teknik keabsahan data ini dilakukan melalui proses diskusi dengan teman sejawat dengan memaparkan hasil sementara atau hasil akhir.

d. Teknik keabsahan data uraian rinci; teknik keabsahan data ini mengharuskan peneliti untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga uraiannya dilakukan dengan teliti dan secermat mungkin.[20]

8. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Triangulasi juga merupakan proses melakukan pengujian kredibilitas dalam penelitian, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.[21] Metode triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi dari

[20]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Roesda Karya, 1996), 175 – 183.
[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Peneliti melakukan pengecekan data yang telah diperoleh secara langsung dari informan, setelah itu dapat dinyatakan valid atau tidak dan juga melakukan pengecekan dengan observasi serta dokumentasi yang telah diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini agar lebih sistematis dan mudah untuk dipahami, maka peneliti memaparkan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB I, Pendahuluan. Dimana merupakan gambaran secara umum dan pengantar pembahasan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Kerangka Teori. Yang terdiri dari konsep tentang gerakan sosial serta memaparkan gerakan buruh di Indonesia.

BAB III, *Setting* Penelitian. Dalam *setting* penelitian terdiri dari deskripsi tentang lokasi penelitian dan pemilihan lokasi penelitian serta mendeskripsikan tentang KSPSI sebagai serikat pekerja/buruh.

BAB IV, Penyajian dan Analisis Data. Dalam bab ini terdiri dari deskripsi temuan di lapangan, dan pembahasan yang berisi tentang analisis antara temuan dan teori.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V, Penutup. Yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id